

## Optimalisasi Fungsi TKPKD dalam Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Pesisir Selatan

Nofendri<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Indonesia.

\*Corresponding Author e-mail: [nofenbuchari@gmail.com](mailto:nofenbuchari@gmail.com)

Received: June 2026; Revised: July 2026; Published: August 2026

### Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang memerlukan koordinasi lintas sektor agar kebijakan penanggulangannya dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi tantangan berupa lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, belum terintegrasinya data kemiskinan, serta belum optimalnya fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi fungsi TKPKD dalam meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap data Badan Pusat Statistik, dokumen perencanaan daerah, laporan pelaksanaan program, serta berbagai regulasi terkait penanggulangan kemiskinan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, serta divalidasi melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanggulangan kemiskinan masih menghadapi berbagai kendala, yaitu belum optimalnya koordinasi lintas sektor, belum terintegrasinya data kemiskinan, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, serta masih bersifat sektoralnya pelaksanaan program. Berdasarkan hasil evaluasi, penguatan fungsi TKPKD merupakan alternatif kebijakan yang paling tepat karena mampu meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah, memperkuat integrasi program, mengoptimalkan pemanfaatan data sosial ekonomi terpadu, dan mendukung sistem monitoring serta evaluasi yang lebih efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian evaluasi kebijakan publik melalui penerapan kerangka evaluasi Dunn dalam menilai efektivitas kelembagaan TKPKD, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih terintegrasi dan berbasis bukti di tingkat pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** TKPKD, Kemiskinan, Koordinasi Lintas Sektor, Evaluasi Kebijakan, Pesisir Selatan.

**How to Cite:** Nofendri. (2026). Optimalisasi Fungsi TKPKD dalam Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Pesisir Selatan. *Journal of Authentic Research*, 5(3), 6413–6427. <https://doi.org/10.36312/jar.v5i3.5989>



<https://doi.org/10.36312/jar.v5i3.5989>

Copyright© 2026, Nofendri

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



## PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan berkelanjutan di berbagai negara berkembang karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta berbagai layanan publik dasar (Davis, 2014). Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral semata, melainkan memerlukan koordinasi lintas sektor yang mampu mengintegrasikan berbagai program pembangunan secara

terpadu. Dalam perspektif pembangunan kontemporer, efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan semakin ditentukan oleh kualitas tata kelola kelembagaan, integrasi data, dan sinergi antarorganisasi pemerintah (Patnaik & Shambu Prasad, 2021; Ezeji, 2024).

Di Indonesia, berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, belum optimalnya integrasi data, serta masih kuatnya fragmentasi pelaksanaan program sehingga efektivitas intervensi pemerintah belum sepenuhnya mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan (Silvana & Lubis, 2021; Maria et al., 2023; Ramadhan et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dalam mengoordinasikan kebijakan lintas sektor secara efektif.

Fenomena tersebut juga terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 71,01 pada tahun 2021 menjadi 73,72 pada tahun 2025, tingkat kemiskinan masih mencapai 6,52%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,35% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, 2026; Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2026). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi daerah masih berada pada kisaran 3,35–4,19%, sehingga peningkatan kualitas pembangunan manusia belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan utama bukan semata-mata terletak pada ketersediaan program penanggulangan kemiskinan, tetapi pada belum optimalnya integrasi pelaksanaan program antarperangkat daerah.

Berbagai evaluasi pemerintah daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, seperti belum optimalnya fungsi koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), belum terintegrasinya data kemiskinan antarperangkat daerah, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, serta belum optimalnya pemanfaatan data *by name by address* sebagai dasar penentuan sasaran program. Akibatnya, berbagai program masih berjalan secara sektoral sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kegiatan, ketidaktepatan sasaran, dan rendahnya efektivitas kebijakan.

Secara regulatif, penguatan fungsi TKPKD memiliki landasan hukum yang kuat. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 menempatkan penurunan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah melalui peningkatan ketepatan sasaran program, integrasi lintas sektor, dan penguatan kelembagaan. Kebijakan tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 mengenai pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 4 Tahun 2025 mengenai Pedoman Umum Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Keseluruhan regulasi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan

kemiskinan memerlukan koordinasi kelembagaan yang kuat, integrasi data, serta sinkronisasi pelaksanaan program antarperangkat daerah.

Fenomena tersebut juga terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 71,01 pada tahun 2021 menjadi 73,72 pada tahun 2025, tingkat kemiskinan masih mencapai 6,52%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,35% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, 2026; Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2026). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi daerah masih berada pada kisaran 3,35–4,19%, sehingga peningkatan kualitas pembangunan manusia belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada ketersediaan program penanggulangan kemiskinan, tetapi juga pada belum optimalnya integrasi pelaksanaan program antarperangkat daerah. Oleh karena itu, penguatan koordinasi kelembagaan menjadi kebutuhan strategis dalam tata kelola penanggulangan kemiskinan. Secara normatif, arah tersebut telah ditegaskan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 yang menetapkan penurunan kemiskinan sebagai sasaran prioritas melalui peningkatan ketepatan sasaran, integrasi program, efektivitas pelaksanaan, dan sinergi antarperangkat daerah, sehingga keberhasilan penanggulangan kemiskinan ditentukan tidak hanya oleh besarnya alokasi program, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan secara terpadu.

Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 yang mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai forum koordinasi lintas sektor di tingkat kabupaten/kota, dengan tugas mengoordinasikan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), menyinergikan program antarperangkat daerah, melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta mengembangkan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 menegaskan pentingnya sinkronisasi program melalui pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan, sedangkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 4 Tahun 2025 mengharuskan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Namun demikian, implementasi di Kabupaten Pesisir Selatan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum optimalnya fungsi koordinasi TKPKD, monitoring dan evaluasi yang masih bersifat administratif, serta belum terintegrasinya pemanfaatan data by name by address antarperangkat daerah. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program masih berjalan secara sektoral sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih program, ketidaktepatan sasaran, dan rendahnya efektivitas kebijakan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara mandat regulatif (*regulatory expectation*) dan praktik implementasi (*implementation reality*) yang perlu dikaji secara lebih mendalam.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan selama ini lebih banyak berfokus pada determinan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, bantuan sosial, dan pembangunan manusia (Molo, 2016; Leichenko & Silva, 2024). Beberapa penelitian lain mengkaji implementasi kebijakan dan tata kelola penanggulangan

kemiskinan melalui pendekatan koordinasi lintas sektor maupun *collaborative governance* (Patnaik & Shambu Prasad, 2021; Ezeji, 2024). Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengevaluasi efektivitas fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai institusi koordinatif menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik masih relatif terbatas, khususnya pada konteks pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, *research gap* penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan analisis kelembagaan TKPKD, evaluasi kebijakan publik, dan koordinasi lintas sektor dalam menjelaskan efektivitas penanggulangan kemiskinan daerah. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada hasil pembangunan ekonomi atau efektivitas program tertentu, sedangkan aspek tata kelola kelembagaan sebagai faktor yang menentukan keterpaduan kebijakan belum memperoleh perhatian yang memadai.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui evaluasi fungsi kelembagaan TKPKD menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan William Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan ini tidak hanya mengidentifikasi berbagai permasalahan implementasi kebijakan, tetapi juga membandingkan alternatif kebijakan yang paling tepat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan berbasis evaluasi sistematis terhadap tata kelola kelembagaan.

Penelitian ini menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William Dunn (2015) sebagai pisau analisis untuk menilai berbagai alternatif kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kerangka tersebut dipilih karena mampu mengevaluasi kebijakan secara komprehensif berdasarkan enam dimensi evaluasi sehingga dapat menjelaskan sejauh mana penguatan fungsi TKPKD mampu meningkatkan efektivitas koordinasi, integrasi program, serta tata kelola penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam meningkatkan koordinasi lintas sektor guna mewujudkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian evaluasi kebijakan publik berbasis kelembagaan sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola penanggulangan kemiskinan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berbasis bukti.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan (*policy analysis*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui analisis terhadap fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai lembaga koordinasi lintas sektor di Kabupaten Pesisir Selatan. Analisis kebijakan dilakukan menggunakan kerangka evaluasi William N. Dunn (2018) yang meliputi enam kriteria, yaitu efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), pemerataan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), dan ketepatan

(appropriateness). Kerangka ini digunakan untuk mengevaluasi alternatif kebijakan serta menentukan alternatif yang paling tepat dalam memperkuat koordinasi penanggulangan kemiskinan.

Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen resmi pemerintah. Dokumen yang dianalisis meliputi data kemiskinan dan indikator pembangunan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, data penerima bantuan sosial, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 4 Tahun 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/9812/SJ Tahun 2026.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (document study) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji dokumen kebijakan, dokumen perencanaan, laporan pelaksanaan program, data statistik, serta regulasi yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Seluruh dokumen dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya terhadap tujuan penelitian, khususnya dokumen yang memuat informasi mengenai pelaksanaan fungsi koordinasi TKPKD, integrasi program, pemanfaatan data kemiskinan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi kebijakan.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan model evaluasi kebijakan Dunn. Tahapan analisis meliputi: (1) identifikasi permasalahan kebijakan berdasarkan kondisi empiris penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan; (2) reduksi dan kategorisasi data sesuai enam kriteria evaluasi Dunn; (3) identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi TKPKD; (4) penyusunan dan penilaian alternatif kebijakan berdasarkan enam kriteria evaluasi; serta (5) penentuan alternatif kebijakan yang paling optimal untuk memperkuat koordinasi penanggulangan kemiskinan. Proses analisis dilakukan secara iteratif dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen sehingga diperoleh interpretasi yang komprehensif terhadap permasalahan kebijakan.

Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang berasal dari dokumen perencanaan daerah, data statistik Badan Pusat Statistik, laporan pelaksanaan program, dokumen kebijakan, dan regulasi nasional. Triangulasi dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi, mengurangi potensi bias dari satu sumber data, serta meningkatkan validitas temuan penelitian.

Operasionalisasi evaluasi kebijakan menggunakan enam kriteria William N. Dunn sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Operasionalisasi Kriteria Evaluasi Kebijakan Dunn

| Kriteria Evaluasi | Indikator Analisis                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efektivitas       | Kemampuan kebijakan mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan koordinasi TKPKD |

|               |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Efisiensi     | Pemanfaatan sumber daya, anggaran, dan mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan program |
| Kecukupan     | Kemampuan kebijakan menjawab permasalahan utama penanggulangan kemiskinan             |
| Pemerataan    | Keadilan distribusi manfaat program kepada kelompok sasaran                           |
| Responsivitas | Kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan             |
| Ketepatan     | Kesesuaian alternatif kebijakan dengan karakteristik permasalahan dan konteks daerah  |

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder sehingga analisis bergantung pada kelengkapan dan kualitas dokumen yang tersedia. Meskipun demikian, penggunaan berbagai sumber dokumen yang saling melengkapi serta penerapan triangulasi sumber diharapkan mampu menghasilkan evaluasi kebijakan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Pembangunan dan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan

Analisis terhadap indikator pembangunan menunjukkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan kualitas pembangunan manusia selama periode 2021–2025. Peningkatan tersebut tercermin dari naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 71,01 pada tahun 2021 menjadi 73,72 pada tahun 2025. Pada periode yang sama, usia harapan hidup meningkat dari 73,12 tahun menjadi 73,68 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah bertambah dari 8,27 tahun menjadi 9,06 tahun. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada dimensi pendidikan dan kesehatan sebagai komponen utama pembangunan manusia.

Tabel 2. Perkembangan Indikator Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2025

| Indikator                        | 2021  | 2025  | Perubahan |
|----------------------------------|-------|-------|-----------|
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 71,01 | 73,72 | 2,71      |
| Usia Harapan Hidup (tahun)       | 73,12 | 73,68 | 0,56      |
| Rata-rata Lama Sekolah (tahun)   | 8,27  | 9,06  | 0,79      |

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan (2026).

Meskipun indikator pembangunan manusia mengalami peningkatan, kondisi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan maupun pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pada tahun 2025 tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan tercatat sebesar 6,52%, masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,35%, meskipun lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,25%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,35% pada tahun 2021 menjadi 4,19% pada tahun 2025, namun masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang telah melampaui lima persen.

Tabel 3. Kondisi Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan

| Indikator                                    | Nilai |
|----------------------------------------------|-------|
| Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan | 6,52% |
| Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat   | 5,35% |
| Tingkat Kemiskinan Nasional                  | 8,25% |
| Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021               | 3,35% |
| Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025               | 4,19% |

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan (2026); BPS Provinsi Sumatera Barat (2026).

### Kondisi Kemiskinan dan Program Perlindungan Sosial

Analisis terhadap indikator kemiskinan menunjukkan bahwa nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 sebesar 0,97, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,22. Selain menggambarkan kondisi kemiskinan, penelitian juga mengidentifikasi perkembangan berbagai program perlindungan sosial yang dilaksanakan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami penurunan jumlah penerima dari 20.118 keluarga penerima manfaat pada tahun 2023 menjadi 17.088 penerima pada tahun 2026. Sebaliknya, jumlah penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) masih berada pada kisaran lebih dari 150.000 penerima, sedangkan bantuan sembako berfluktuasi antara 29.638 hingga 38.033 penerima selama periode pengamatan.

Tabel 4. Indikator Kemiskinan dan Program Perlindungan Sosial

| Indikator                        | Nilai                    |
|----------------------------------|--------------------------|
| Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | 0,97                     |
| Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | 0,22                     |
| PKH                              | 20.118 → 17.088 penerima |
| PBI Jaminan Kesehatan            | >150.000 penerima        |
| Bantuan Sembako                  | 29.638–38.033 penerima   |

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan (2026); Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan (2026).

### Temuan Utama Permasalahan Penanggulangan Kemiskinan

Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa permasalahan utama penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan tidak terletak pada ketersediaan program, tetapi pada pelaksanaan program yang belum sepenuhnya terintegrasi. Berbagai perangkat daerah telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, namun koordinasi antarperangkat daerah belum berjalan secara optimal.

Penelitian mengidentifikasi lima temuan utama. Pertama, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan masih berjalan secara sektoral sehingga sinkronisasi antarprogram belum optimal. Kedua, fungsi koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) belum sepenuhnya berjalan sesuai mandat regulasi, khususnya dalam mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program lintas sektor. Ketiga, mekanisme monitoring dan evaluasi masih berorientasi pada pelaporan administratif dan belum menggunakan indikator evaluasi yang terintegrasi. Keempat, pemanfaatan data kemiskinan belum sepenuhnya menggunakan basis data yang sama sehingga masih ditemukan perbedaan data antarperangkat daerah. Kelima, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(RPKD) belum sepenuhnya menjadi acuan operasional bagi seluruh organisasi perangkat daerah.

Tabel 5. Temuan Utama Permasalahan Penanggulangan Kemiskinan

| No | Temuan                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 1  | Program penanggulangan kemiskinan belum terintegrasi           |
| 2  | Fungsi koordinasi TKPKD belum optimal                          |
| 3  | Monitoring dan evaluasi belum berjalan secara terintegrasi     |
| 4  | Data kemiskinan belum sepenuhnya sinkron antarperangkat daerah |
| 5  | RPKD belum menjadi acuan operasional seluruh perangkat daerah  |

Sumber: Analisis peneliti berdasarkan dokumen kebijakan Kabupaten Pesisir Selatan (2026).

### Evaluasi Alternatif Kebijakan

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan enam kriteria William Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, diperoleh lima alternatif kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan. Alternatif tersebut meliputi penguatan fungsi TKPKD, integrasi program, penguatan data terpadu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penguatan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) memperoleh penilaian paling dominan pada kategori tinggi dibandingkan alternatif lainnya. Alternatif ini menunjukkan kinerja yang baik pada aspek efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Sementara itu, alternatif integrasi program dan monitoring-evaluasi terintegrasi juga memperoleh penilaian tinggi pada sebagian besar kriteria evaluasi.

Tabel 6. Evaluasi Alternatif Kebijakan Berdasarkan Kriteria Dunn

| Kriteria      | Penguatan TKPKD | Integrasi Program | Data Terpadu | Peningkatan SDM | Monev Terintegrasi |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Efektivitas   | Tinggi          | Tinggi            | Sedang       | Sedang          | Tinggi             |
| Efisiensi     | Sedang          | Tinggi            | Tinggi       | Sedang          | Sedang             |
| Kecukupan     | Tinggi          | Sedang            | Sedang       | Sedang          | Sedang             |
| Pemerataan    | Tinggi          | Tinggi            | Tinggi       | Tinggi          | Tinggi             |
| Responsivitas | Tinggi          | Sedang            | Tinggi       | Tinggi          | Tinggi             |
| Ketepatan     | Tinggi          | Tinggi            | Sedang       | Tinggi          | Tinggi             |

### Penentuan Alternatif Kebijakan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap seluruh alternatif kebijakan, penelitian menetapkan penguatan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai alternatif kebijakan yang paling optimal. Alternatif ini dipilih karena memiliki kemampuan yang lebih baik dalam meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat integrasi program, mendorong sinkronisasi data kemiskinan, serta memperbaiki mekanisme monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, penguatan fungsi TKPKD dipandang sebagai prioritas kebijakan untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang lebih terpadu di Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan tidak disebabkan oleh ketiadaan program

atau keterbatasan anggaran, melainkan oleh lemahnya integrasi kelembagaan antar perangkat daerah. Program penanggulangan kemiskinan telah dijalankan secara lintas sektor dengan dukungan anggaran yang signifikan, namun pelaksanaannya masih bersifat sektoral dan belum terkoordinasi dalam satu sistem tata kelola yang terpadu. Kondisi ini mencerminkan adanya fragmentasi kebijakan publik yang dalam perspektif Pollitt, (2003) serta Aoki et al., (2024) disebut sebagai kegagalan *joined-up government*, yaitu kondisi ketika berbagai aktor kebijakan tidak terhubung dalam satu kerangka koordinasi yang efektif sehingga menurunkan kinerja kebijakan secara keseluruhan.

Kelemahan koordinasi tersebut juga memperkuat relevansi teori Edwards III yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edwards, 1980). Dalam kajian implementasi kebijakan kontemporer, keempat variabel tersebut masih digunakan secara luas untuk menganalisis kegagalan maupun keberhasilan implementasi kebijakan publik, khususnya pada level pemerintah daerah (Akib, 2012; Habsana et al., 2026). Dalam konteks penelitian ini, kelemahan utama terletak pada aspek struktur birokrasi dan komunikasi antar perangkat daerah, di mana koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) masih bersifat formal-administratif dan belum berfungsi sebagai mekanisme pengendali kebijakan yang efektif. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa kelemahan komunikasi dan struktur birokrasi menjadi faktor dominan yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan lintas sektor (Adiwinarni et al., 2020). Akibatnya, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang telah disusun belum sepenuhnya menjadi acuan operasional lintas sektor, sehingga terjadi kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan di lapangan.

Dari perspektif kelembagaan, temuan ini sejalan dengan teori North (1990) yang menyatakan bahwa institusi menentukan kinerja ekonomi dan kebijakan melalui aturan main yang mengikat aktor-aktor di dalamnya. Lemahnya fungsi TKPKD menunjukkan bahwa institusi koordinatif tersebut belum memiliki daya ikat yang kuat dalam mengarahkan perilaku organisasi perangkat daerah, sehingga setiap sektor masih cenderung berjalan sendiri dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Kondisi ini menyebabkan rendahnya efektivitas integrasi program, meskipun secara formal struktur kelembagaan telah tersedia.

Dari perspektif kelembagaan, temuan ini sejalan dengan perkembangan teori *new institutionalism* yang menekankan bahwa institusi tidak hanya dipahami sebagai struktur formal, tetapi juga sebagai mekanisme yang mengatur interaksi, koordinasi, dan kepatuhan aktor dalam sistem pemerintahan (Baldwin et al., 2019; North, 1990). Dalam konteks tata kelola publik kontemporer, efektivitas institusi sangat ditentukan oleh kemampuan dalam membangun koordinasi lintas sektor yang terintegrasi melalui mekanisme *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2018; Emerson et al., 2012). Lemahnya fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) menunjukkan bahwa institusi koordinatif tersebut belum memiliki daya ikat yang kuat dalam mengarahkan perilaku organisasi perangkat daerah, sehingga setiap sektor masih cenderung berjalan secara sektoral (*silo-based governance*). Kondisi ini sejalan dengan temuan studi terbaru yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah masih menghadapi masalah fragmentasi kelembagaan, lemahnya koordinasi, serta rendahnya integrasi antaraktor

(Andi et al., 2026; Lawelai & Nurmandi, 2023). Meskipun secara formal struktur kelembagaan telah tersedia, efektivitas integrasi program penanggulangan kemiskinan masih rendah karena lemahnya *enforcement* institusional dan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.

Permasalahan juga tampak pada data kemiskinan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan data *by name by address* masih terkendala akses dan adanya perbedaan kriteria antar perangkat daerah dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. sehingga, sasaran program penanggulangan kemiskinan sering kali kurang tepat. Redman, (1997) menekankan bahwa kualitas data merupakan dasar penting dalam pengambilan keputusan publik. Data yang tidak akurat akan menghasilkan kebijakan yang juga kurang efektif dan tidak tepat sasaran. Dalam perkembangan tata kelola data saat ini, integrasi dan keterhubungan antar data menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan ketepatan kebijakan sosial, terutama dalam program penanggulangan kemiskinan yang berbasis *single data system* (PPN/Bappenas, 2020; World Bank, 2021). Studi terbaru juga menunjukkan bahwa fragmentasi data antarinstansi merupakan salah satu penyebab utama rendahnya efektivitas *targeting* program bantuan sosial di negara berkembang, termasuk Indonesia (World Bank, 2023). Maka dari itu, permasalahan bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga menunjukkan belum terbentuknya sistem data terpadu yang mengikat seluruh aktor kebijakan secara efektif.

Selain itu, dari perspektif pembangunan ekonomi, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara peningkatan kualitas pembangunan manusia dan dampaknya terhadap penurunan kemiskinan. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), usia harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan, tingkat kemiskinan masih relatif tinggi. Temuan ini sejalan dengan pendekatan Amartya Sen yang menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai kekurangan pendapatan, tetapi juga sebagai keterbatasan kemampuan (*capability deprivation*) dalam mengakses peluang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan (Sen, 1999).

Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan indikator pembangunan manusia belum sepenuhnya berbanding lurus dengan perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam kajian kemiskinan kontemporer, hal tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan kemiskinan multidimensi yang menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang produktif (Hohberg et al., 2021). Dalam konteks evaluasi kebijakan, pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy evaluation*) dan penggunaan kriteria evaluasi yang sistematis menjadi penting untuk memastikan ketepatan pengambilan keputusan (VanLandingham, 2020).

Lebih lanjut, hasil evaluasi menunjukkan bahwa penguatan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) merupakan alternatif kebijakan yang paling dominan, namun implementasinya masih menghadapi kendala koordinasi dan integrasi data. Pemanfaatan data *by name by address* belum sepenuhnya terintegrasi akibat perbedaan kriteria antar perangkat daerah, yang berdampak pada ketidaktepatan *targeting* program penanggulangan kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan masih kuatnya fragmentasi kelembagaan dan lemahnya mekanisme koordinasi lintas sektor dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dalam

perspektif *collaborative governance*, efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan aktor dalam membangun kerja sama lintas sektor yang terstruktur (Lawelai & Nurmandi, 2023), sementara kelemahan koordinasi institusional juga mencerminkan rendahnya efektivitas tata kelola desentralisasi (Shoesmith et al., 2020). Di sisi lain, keterbatasan integrasi data menunjukkan tantangan serius dalam sistem perlindungan sosial berbasis data terpadu yang masih menjadi isu dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan.

penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan sangat dipengaruhi oleh lemahnya integrasi kelembagaan, khususnya pada fungsi koordinatif TKPKD yang belum berjalan optimal dalam mengarahkan sinergi lintas perangkat daerah. Kondisi tersebut diperkuat oleh masih terfragmentasinya pelaksanaan program, lemahnya komunikasi antaraktor kebijakan, serta belum terintegrasinya sistem data by name by address yang berdampak pada ketidaktepatan sasaran program. Di sisi lain, peningkatan indikator pembangunan manusia belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan, yang mengindikasikan adanya keterbatasan akses dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan peluang pembangunan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor yang lebih mengikat, pengembangan sistem data terpadu yang konsisten antarinstansi, serta penguatan pendekatan kebijakan berbasis kolaborasi agar intervensi penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan terintegrasi dalam praktiknya.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan program dan besaran anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola kelembagaan dalam mengoordinasikan pelaksanaan program lintas sektor. Meskipun berbagai indikator pembangunan, seperti Indeks Pembangunan Manusia, terus mengalami peningkatan, implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum optimalnya fungsi koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), belum terintegrasinya data kemiskinan, lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi, serta masih bersifat sektoralnya pelaksanaan program pada masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan evaluasi menggunakan enam kriteria William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, penelitian ini menetapkan penguatan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai alternatif kebijakan yang paling tepat untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penguatan fungsi tersebut diharapkan mampu meningkatkan koordinasi lintas sektor, menyinergikan perencanaan dan pelaksanaan program, memperkuat pemanfaatan data sosial ekonomi terpadu, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terintegrasi sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penerapan kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn untuk menilai efektivitas kelembagaan TKPKD dalam konteks penanggulangan kemiskinan daerah. Pendekatan ini tidak hanya mengidentifikasi

berbagai kelemahan implementasi kebijakan, tetapi juga menghasilkan dasar yang sistematis dalam menentukan alternatif kebijakan yang paling sesuai untuk memperkuat tata kelola penanggulangan kemiskinan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, meningkatkan integrasi data kemiskinan, dan menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih adaptif dan berbasis bukti.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan data statistik sehingga belum menggambarkan secara langsung perspektif para pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran program. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengombinasikan analisis dokumen dengan wawancara mendalam atau *focus group discussion* (FGD) bersama pemerintah daerah, anggota TKPKD, dan pemangku kepentingan lainnya agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika koordinasi dan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah.

## REFERENSI

- Adiwinarni, N., Puspita, D. R., & Rosyadi, S. (2020). Membaca aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam kebijakan publik: Studi implementasi program pertemuan peningkatan kemampuan keluarga Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 11(1), 37–43. <https://doi.org/10.23960/administratio.v11i1.105>
- Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>
- Andi, A. S. F., & Oktavia, M. (2026). Collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan melalui Program Tasik Bageur di Kota Tasikmalaya. *Journal of Administrative and Social Science*, 7(1), 333–350. <https://doi.org/10.55606/jass.v7i1.2242>
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Aoki, N., Tay, M., & Rawat, S. (2024). Whole-of-government and joined-up government: A systematic literature review. *Public Administration*, 102(2), 733–752. <https://doi.org/10.1111/padm.12949>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan. (2026). *Kabupaten Pesisir Selatan dalam angka 2026*. BPS Kabupaten Pesisir Selatan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2026). *Provinsi Sumatera Barat dalam angka 2026*. BPS Provinsi Sumatera Barat.
- Baldwin, E., Chen, T., & Cole, D. (2019). Institutional analysis for new public governance scholars. *Public Management Review*, 21(6), 890–917. <https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1538427>
- Davis, E. P. (2014). *A review of the economic theories of poverty*.
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. (2026). *Data bantuan sosial terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023–2026*.
- Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis*. Routledge.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Eviany, E., & Sutiyo, S. (2023). *Perlindungan masyarakat: Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan*. Nas Media Pustaka.
- Ezeji, C. L. (2024). The role of South Africa Border Management Authority in tackling border crime: Evaluating security networks and evidence-based policing approaches. *International Journal of Business Ecosystem & Strategy*, 6(4), 393–407. <https://doi.org/10.36096/ijbes.v6i4.545>
- Habsana, T. Y. P., Kencono, D. S., & Fridayani, H. D. (2026). Implementation challenges of Indonesia's electronic-based government system: An Edwards III perspective. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 7(2), 168–180. <https://doi.org/10.18196/jpk.v7i2.29243>
- Hardianto, H. (2022). Determinasi pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan desa: Analisis dana desa dan alokasi dana desa (Literature review manajemen keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 266–275. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.872>
- Hohberg, M., Donat, F., Marra, G., & Kneib, T. (2021). Beyond unidimensional poverty analysis using distributional copula models for mixed ordered-continuous outcomes. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)*, 70(5), 1365–1390. <https://doi.org/10.1111/rssc.12517>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2026). *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/9812/SJ perihal Pedoman Panduan Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2026*.
- Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*.
- Kunyati, S. A. (2018). A descriptive study on poverty investigation in Sukabumi City, West Java Province, Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Social Sciences*, 1(1).
- Kusumaningrum, S. D., & Sambodo, D. P. (2015). Potential link patterns of fiscal decentralization to poverty reduction in Indonesia. *Asian Journal for Poverty Studies*, 1(1), 34–43.
- Lawelai, H., & Nurmandi, A. (2023). The model of collaborative governance in addressing poverty in Indonesia. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer*, 2(2), 195–206. <https://doi.org/10.47134/rapik.v2i2.27>
- Leichenko, R., & Silva, J. A. (2024). Climate change and poverty. In S. R. Brechin & S. Lee (Eds.), *Routledge handbook of climate change and society* (2nd ed., pp. 374–387). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003291206-31>

- Maria, W. N., Ulpa, A., Kirana, N. N., & Handayani, D. N. (2023). Implementasi program pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Pontianak. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 210–224.
- Molo, M. (2016). Kemiskinan: Konsep, pengukuran dan kebijakan. *Populasi*, 6(2). <https://doi.org/10.22146/jp.11450>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Patnaik, S., & Shambu Prasad, C. (2021). Coordination in multi-actor policy implementation: Case study of a livelihood enhancement programme in India. *Development in Practice*, 31(4), 523–532. <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1861220>
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. (2025). *Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025*.
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. (2025). *Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029*.
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. (2026). *Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/110/Kpts/BPT-PS/2026 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan*.
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. (2026). *Rencana aksi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026*.
- Pollitt, C. (2003). Joined-up government: A survey. *Political Studies Review*, 1(1), 34–49. <https://doi.org/10.1111/1478-9299.00004>
- PPN/Bappenas. (2020). *Satu Data Indonesia: Kebijakan dan implementasi*. <https://satudata.bappenas.go.id>
- Pratama, S. D. (2026). Incorporating sustainability into poverty measurement in Indonesia. *Statistical Journal of the IAOS*. <https://doi.org/10.1177/18747655261455624>
- Prowse, M., Grist, N., & Sourang, C. (2009). *Closing the gap between climate adaptation and poverty reduction frameworks*.
- Ramadhan, A., Suhendra, A., & Yohanitas, W. A. (2025). One Data Indonesia: A retrospective analysis of data interoperability in declaring regional planning and development. *KnE Social Sciences*, 10(16), 152–171. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i16.19169>
- Redman, T. C. (1997). *Data quality for the information age*. Artech House.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Shoesmith, D., Franklin, N., & Hidayat, R. (2020). Decentralised governance in Indonesia's disadvantaged regions: A critique of the underperforming model of local governance in Eastern Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(3), 359–380. <https://doi.org/10.1177/1868103420963140>
- Silvana, M., & Lubis, D. (2021). Faktor yang memengaruhi kemandirian ekonomi pesantren (Studi Pesantren Al-Ittifaq Bandung). *Al-Muzara'ah*, 9(2), 129–146. <https://doi.org/10.29244/jam.9.2.129-146>
- Tan, F. (2014). Fishermen economic development management systems in the South Coastal District of West Sumatra, Indonesia.
- Umami, U. (2013). Cara pandang dan upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 9(4), 343–351. <https://doi.org/10.14710/pwk.v9i4.6673>

- VanLandingham, G. (2020). Evaluation in the age of evidence-based policymaking: Promises, pitfalls and paths forward. *Evaluation Journal of Australasia*, 20(3), 129–139. <https://doi.org/10.1177/1035719X20928164>
- Wagianto, W., Syah, N., Dewata, I., Umar, I., & Putra, A. (2024). The population explosion: Indonesian's dilemma amid limited resources. <https://doi.org/10.1063/5.0184169>
- World Bank. (2021). *Indonesia social assistance reform and data integration*. <https://www.worldbank.org>
- World Bank. (2023). *Improving targeting of social assistance in Indonesia*. <https://www.worldbank.org>